

ANALISIS KONTRIBUSI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI ERA MERDEKA BELAJAR (STUDI KASUS UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK DI UPT SD NEGERI KINGKING 2 TUBAN)

Vina Eka Diana¹, Kaniati Amalia²

¹ Universitas Negeri Surabaya; vina.21063@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; kaniatiamalialia@mhs.unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Pengelolaan sarana prasarana;
Motivasi belajar;
Merdeka belajar

Riwayat artikel:

Diterima 2025-06-12

Direvisi 2025-06-20

Diterima 2025-06-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Era Merdeka Belajar. Studi kasus dilakukan di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban, sebuah sekolah dasar dengan keterbatasan infrastruktur, namun mampu mengelola fasilitas pendidikan secara inovatif dan efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta triangulasi dan member check untuk uji keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana di sekolah tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan memaksimalkan ruang dan potensi lokal. Pengelolaan mencakup perencanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang terintegrasi dengan program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Meskipun keterbatasan fisik ada, siswa tetap menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan fasilitas yang kreatif dan kontekstual dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Penulis yang sesuai:

Vina Eka Diana

Afiliasi 1; vina.21063@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, salah satu aspek terpenting dalam menunjang proses pendidikan adalah ketersediaan fasilitas penunjang serta manajemen sarana prasarana yang diberikan stakeholder terkait. Sarana prasarana meliputi berbagai fasilitas fisik yang memfasilitasi proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga perangkat teknologi pendidikan. Sarana prasarana yang memadai mampu memberikan dampak positif pada tingkat motivasi belajar peserta didik (Nurhuda, Al Fajri, Shahrulerizal, & Rahman, 2023). Kualitas sarana prasarana di sekolah merupakan salah satu

elemen penting yang memiliki dampak besar terhadap hasil akademik peserta didik. Keberhasilan pembelajaran di kelas sangat ditentukan oleh kelengkapan dan ketersediaan sarana pendidikan. Sarana Pendidikan di sekolah dalam hal ini merujuk kepada fasilitas sekolah. Menurut Darmastuti (2014), manajemen fasilitas sekolah merupakan upaya terkoordinasi untuk memastikan penggunaan peralatan dan infrastruktur secara efektif dan efisien. Tanggung jawab ini ada pada tenaga kependidikan, yang harus memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur dikelola secara optimal untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Manajemen fasilitas yang efektif menjadi hal mendasar untuk mencapai tujuan sekolah dan menjamin kelancaran operasional kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, pengelolaan fasilitas pendidikan membutuhkan panduan yang jelas dan terstandardisasi, sebagaimana diatur dalam regulasi nasional (Devi, 2021).

keberhasilan pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Fuad (2016) yang menguraikan bahwa gedung dan infrastruktur yang baik serta terkelola secara optimal dapat meningkatkan kualitas program pendidikan. Kerusakan atau kurangnya fasilitas, seperti ruang kelas yang tidak layak, dapat menghambat proses belajar siswa. Oleh karena itu, manajemen fasilitas dan infrastruktur yang sesuai standar nasional menjadi sangat penting. Ketentuan mengenai standar minimal untuk ruang belajar, tempat kegiatan fisik, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas lainnya tercantum dalam Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Standar Infrastruktur Pendidikan (Mohamad Mustari, 2022). Untuk memastikan bahwa setiap sekolah - sekolah di Indonesia dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, berbagai peraturan pemerintah telah ditetapkan guna sebagai dasar hukum berbagai aktivitas pendidikan. Salah satu peraturan yang mengatur hal ini adalah Permendiknas No. 24 Tahun 2007, yang berisi tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Aturan ini menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap sekolah untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran secara efektif. (Permendiknas-No.-24-Tahun-2007 STANDAR Sarana, 2011) Namun, peraturan ini telah diperbaharui dan diselaraskan melalui Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, yang menjadi dasar acuan terbaru. Peraturan ini mencakup ketentuan lebih rinci mengenai sarana dan prasarana pendidikan, termasuk ruang belajar, laboratorium, tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan perpustakaan, yang dirancang untuk mendukung pembelajaran yang efektif di semua jenjang pendidikan (KEMENDIKBUDRISTEK, 2023). Namun demikian, di tengah upaya pemerintah dalam menjamin standar sarana dan prasarana pendidikan melalui berbagai regulasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sekolah-sekolah yang menghadapi keterbatasan fasilitas. Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Katiman bahkan mengakui bahwa banyak sekolah belum mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan sarpras selama beberapa tahun terakhir, Untuk itulah, pemerataan sarpras, digitalisasi pembelajaran, dan revitalisasi sekolah dijadikan prioritas nasional (KOORDINATOR & KEBUDAYAAN, n.d.)

Meskipun begitu, keterbatasan tersebut tidak selalu menjadi penghambat dalam mendorong motivasi belajar siswa, selama terdapat pengelolaan yang kreatif dan inovatif dari pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban yang mampu menunjukkan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana secara optimal meskipun dalam kondisi keterbatasan. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang

menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Namun, kenyataannya tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Meskipun demikian, kondisi tersebut bukan menjadi penghalang utama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan manajemen yang baik, keterbatasan yang ada justru dapat diatasi secara kreatif dan inovatif sehingga tetap mendukung proses pembelajaran yang efektif. Pengelolaan yang tepat mencakup pemanfaatan maksimal terhadap fasilitas yang tersedia, perawatan rutin, serta penyusunan strategi penggunaan sarana agar mendukung kebutuhan belajar siswa secara optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pembelajaran tidak harus terbatas pada lingkungan sekolah saja. Fasilitas di luar sekolah seperti perpustakaan daerah, taman edukatif, museum, pusat teknologi, atau sarana belajar berbasis digital juga dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pembelajaran. Dalam konteks ini, keterbatasan fasilitas di sekolah dapat diimbangi dengan kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan fasilitas masyarakat, serta dukungan teknologi informasi. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses terhadap sumber belajar, tetapi juga dapat membangun semangat dan motivasi siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri di berbagai lingkungan (Adab, Humaniora, Ar-raniry, & Aceh, 2023).

Dalam Era Merdeka Belajar penerapan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) dalam kurikulum sekolah, sarana dan prasarana (sarpras) memiliki peran yang sangat penting. Menurut PP No 12 Tahun 2024, hal-hal yang terkait dengan sarpras dalam pelaksanaan P5 antara lain:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Pelaksanaan proyek membutuhkan dukungan berupa fasilitas fisik yang memadai. Ini mencakup semua kebutuhan untuk mewujudkan proses pendidikan yang kondusif.
2. Sarana: Ini mencakup kebutuhan sosial dan kultural yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Sarana pendidikan dapat mencakup alat, sumber belajar, dan media pembelajaran.
3. Prasarana: Meliputi gedung/bangunan, ruang kelas, laboratorium, serta fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan, seperti prasarana olahraga dan kesenian.
4. Dukungan dari Pihak Terkait: Pengembangan P5 memerlukan kolaborasi antara satuan pendidikan, komite sekolah, orang tua, serta masyarakat dalam menyediakan dan memelihara sarpras yang diperlukan.

Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung aktivitas proyek P5 yang bertujuan untuk melatih sikap dan kompetensi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan sekolah dapat mengelola dan memanfaatkan fasilitas pendidikan secara berkelanjutan, sehingga mendukung efektivitas pembelajaran, pengembangan potensi siswa, serta pemerataan akses terhadap infrastruktur pendidikan yang berkualitas (Kemendikbud, 2024).

Dalam implementasi sarana prasarana, khususnya manajemen fasilitas dan infrastruktur di sekolah tidak hanya bergantung pada regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, operator sekolah, guru, tenaga kependidikan, tata usaha, dan penjaga sekolah. Pemilihan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas dan infrastruktur didasarkan pada kriteria tertentu seperti kompetensi, pengalaman, dan integritas. Pengelolaan yang baik meliputi perencanaan, pemeliharaan, sampai evaluasi terhadap fasilitas dan infrastruktur. Hal ini dilakukan agar selalu dalam kondisi yang optimal. Hubungan antara kualitas sarana dan prasarana dengan motivasi belajar peserta didik juga telah diteliti secara mendalam.

Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat korelasi positif antara kualitas fasilitas dan infrastruktur dengan motivasi belajar siswa. Sekolah-sekolah dengan fasilitas yang baik umumnya memiliki siswa yang lebih unggul dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Sebaliknya, sekolah dengan fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai seringkali menunjukkan semangat belajar peserta didik yang rendah dan prestasi yang tidak optimal (Hidayat Rizandi, Muhammad Arrazi, Asmendri, & Milya Sari, 2023).

Oleh karena itu, meskipun regulasi dan kelengkapan fasilitas memiliki peranan penting, efektivitas pengelolaan tetap menjadi faktor penentu utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi siswa. Hal ini membuka ruang bagi pendekatan yang lebih fleksibel dan kreatif dalam pengelolaan sarana prasarana, terutama di sekolah-sekolah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur. Pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya mencakup pemanfaatan fasilitas yang tersedia di dalam sekolah, tetapi juga bagaimana sekolah mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk lingkungan sekitar, untuk mendukung proses pembelajaran. Di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban, meskipun terdapat keterbatasan fasilitas sekolah tetap mampu memotivasi siswa melalui pengelolaan yang kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, sekolah memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti menggunakan air laut dalam pembelajaran pembuatan telur asin. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif tidak selalu bergantung pada kelengkapan fasilitas, tetapi pada kemampuan sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa. Penelitian oleh Intan Sari Dewi (2021) di MAN 1 Kota Kediri juga menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meskipun dengan keterbatasan fasilitas (Motivasi, Siswa, Man, & Kediri, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban, di mana pengelolaan yang efektif dan kreatif terhadap sarana dan prasarana yang ada dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sarana dan prasarana pembelajaran tidak harus terbatas pada lingkungan sekolah. Fasilitas di luar sekolah seperti perpustakaan daerah, taman edukatif, museum, pusat teknologi, atau sarana belajar berbasis digital dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pembelajaran. Perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada Tahapan manajerial: perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan sementara penelitian ini berfokus pada Strategi pengelolaan kreatif dan inovatif di tengah keterbatasan.

Manajemen sarana dan prasarana (facilities management) sendiri merupakan proses pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik, fasilitas, dan sumber daya non-manusia yang digunakan oleh suatu organisasi. Oleh sebab itu, peran manajemen sarana dan prasarana sangatlah penting di lembaga pendidikan. Contohnya dapat ditemukan di MA Raudlatul Istiqomah Suko-Maroon yang, meskipun memiliki keterbatasan seperti kekurangan gedung, komputer, dan alat-alat penunjang lainnya, tetap mampu menjaga dan bahkan meningkatkan motivasi belajar siswa. Semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara internal maupun eksternal seperti tahfidh, kepramukaan, dan olahraga menjadi bukti bahwa keterbatasan fasilitas tidak selalu menjadi penghalang dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu, secara ringkas, meskipun sama-sama menyoroti bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dan sesuai standar sangat penting untuk keberhasilan proses pendidikan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian di MA Raudlatul Istiqomah Suko-Maroon menekankan pada semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara internal maupun eksternal meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini di UPT SD Negeri

Kingking 2 Tuban menyoroti pengelolaan yang efektif dan kreatif terhadap sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan motivasi belajar siswa (Belajar, Di, Raudlatul, & Suko, 2024).

kondisi sekolah yang memiliki sarana prasarana yang tidak memadai dapat memaksimalkan kemampuan, kompetensi siswa dan dapat dikembangkan sebaik mungkin seperti yang terjadi di SDN KingKing 2 Tuban. Adapun kondisi sekolah di SDN King King Tuban 2 yaitu sekolah yang memiliki keterbatasan lahan yaitu memiliki luas lahan 969 m² hal ini membuat pemanfaatan ruangan seperti ruang perpustakaan harus digabung dengan ruang UKS Sehingga 1 ruangan dimanfaatkan untuk perpustakaan dan UKS yang dibagi dengan sekat rak buku.. Di samping itu, jumlah peserta didiknya berjumlah 69 siswa, dengan total laki-laki sebanyak 34 siswa dan total perempuan sebanyak 35 siswa. Dengan jumlah siswa yang sedikit ini berakibat pada jumlah rombongan belajar yang hanya memiliki 1 di tiap kelas sehingga total kelas sebanyak 6 kelas. Prasarana sekolah yang tersedia di sekolah SDN KingKing 2 Tuban yaitu kamar mandi guru, kamar mandi siswa laki-laki sebanyak 1 buah, kamar mandi siswa putri sebanyak 1 buah, kantin, mushola, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas masing-masing. Terkait sarana yang terdapat di tiap prasarana kurang memadai. Sehingga berdasarkan kondisi terkini sekolah tersebut walaupun memiliki sarana prasarana kurang memadai dalam hal penunjang pembelajaran, namun dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekitar sehingga para peserta didik mampu termotivasi dalam kegiatan belajar di kelas dan lebih giat dalam aktivitas di sekolah.

Selain berkontribusi terhadap motivasi belajar peserta didik, manajemen sarana prasarana juga memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pendidikan di sekolah. Salah satu program sekolah yang sangat bergantung pada ketersediaan sarana yang memadai adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pada kurikulum Merdeka terdapat banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila yang tidak hanya mempelajari tentang materi belajar di kelas tetapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5.

P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Terdapat 7 tema P5 yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Dengan fasilitas yang memadai, pelaksanaan P5 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pengembangan kompetensi siswa. Dalam implementasinya, manajemen fasilitas dan infrastruktur di sekolah sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan P5. Hal ini terlihat dari fasilitas seperti ruang terbuka hijau, ruang kelas yang nyaman, hingga akses terhadap teknologi dan perpustakaan yang menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan proyek ini. Dengan adanya fasilitas yang memadai, peserta didik lebih mudah mengembangkan kompetensi kolaborasi, berpikir kritis, dan kepedulian sosial sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Namun, apabila sarana dan prasarana dinilai masih kurang memadai. Maka, pelaksanaan P5 menjadi kurang optimal, yang berdampak pada hasil belajar siswa secara keseluruhan.

Agar fasilitas dan infrastruktur dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal, pengelolaannya tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan manajerial, tetapi juga harus selaras dengan visi dan misi sekolah. Setiap sekolah memiliki arah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi peserta didik dengan sarana prasarana yang menunjang kegiatan di sekolah. Dengan demikian, visi dan misi sekolah berperan sebagai landasan

dalam merancang strategi pengelolaan fasilitas dan infrastruktur sekolah, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Visi dan misi sekolah memiliki peran strategis sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur sekolah untuk mendukung pendidikan yang berkualitas.

Penelitian ini dilakukan di UPT SD NEGERI KINGKING 2 TUBAN yang beralamat di Jln. Untung Suropati No. 08, Tuban. Sekolah ini memiliki akreditasi B dan menggunakan Kurikulum Merdeka sebagai acuan pembelajaran. Berdasarkan data profil sekolah, UPT SD NEGERI KINGKING 2 TUBAN memiliki luas tanah 969 m² yang berstatus milik pemerintah daerah. Sekolah ini turut mendukung kebijakan Merdeka Belajar dengan memanfaatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) (Dapodik, 2023).

berikut ini merupakan data sarpras di SDN Kingking:

1. Ruang Perpustakaan : Dalam Kondisi Baik
2. Pagar Sekolah : Dalam Kondisi Baik
3. Ruang Guru : Dalam Kondisi Baik
4. Tempat ibadah : Dalam Kondisi Baik
5. Lapangan Olahraga : Dalam Kondisi Baik
6. Ruang Kelas : Dalam Kondisi Baik
7. Kantin : Dalam Kondisi Baik
8. Ruang Kepala Sekolah : Dalam Kondisi Baik
9. Toilet : Dalam Kondisi Baik

Sarana pendidikan yang baik adalah sarana yang tersedia cukup, layak pakai, aman, sesuai kurikulum, mendukung pembelajaran, mudah diakses, dan dirawat secara berkala. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 dan prinsip Standar Nasional Pendidikan yang menekankan mutu, jumlah, dan keberlanjutan (Permendiknas-No.-24-Tahun-2007 STANDAR Sarana, 2011).

Meski demikian, secara fasilitas dan infrastruktur pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah provinsi Jawa Timur masih menghadapi beragam tantangan termasuk ketersediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat banyak sekolah yang masih belum mencapai standar minimal fasilitas dan infrastruktur (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan data di atas. Maka, diperoleh poin penting bahwa SDN KingKing 2 Tuban meskipun memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai tetapi tetap bisa memotivasi peserta didiknya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekitar dengan baik peneliti tertarik pada penelitian ini yang terletak pada keterkaitan sarana dan prasarana di sekolah dasar yang dikelola secara efektif oleh sekolah agar siswa bisa termotivasi dalam belajar meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki sekolah. Dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, sekolah dituntut untuk lebih mandiri dan inovatif dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, fakta di lapangan masih banyak sekolah yang menghadapi kendala dalam pengelolaan fasilitas, baik dari segi keterbatasan fasilitas, kurangnya perawatan, maupun kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran. Dengan demikian, diperlukan adanya upaya peningkatan pengelolaan dan pengadaan barang dalam sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung tercapainya tujuan Merdeka Belajar, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan semangat belajar peserta didik. Jadi, tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan di UPT SD NEGERI KINGKING 2 TUBAN dapat memotivasi belajar peserta didik di UPT SD NEGERI KINGKING 2 TUBAN.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi pengelolaan sarana dan prasarana di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban dapat berkontribusi terhadap motivasi belajar peserta didik dalam konteks Kurikulum Merdeka. Penelitian ini dilakukan di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban, yang berlokasi di Jln. Untung Suropati No. 08, Tuban, pada rentang waktu Februari hingga Maret 2025. Sumber data utama meliputi kepala sekolah, guru kelas, staf pengelola sarana dan prasarana, serta siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai strategi pengelolaan fasilitas, kendala, serta dampaknya terhadap motivasi siswa. Observasi digunakan untuk menilai kondisi dan pemanfaatan fasilitas secara langsung, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk memverifikasi data melalui dokumen seperti SOP, RKAS, foto sarana, serta modul P5.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif untuk menggambarkan kondisi faktual dan temuan-temuan lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh data yang jenuh dan bermakna. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan member check. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Sementara member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud informan (Miles, 2014).

Tahapan penelitian terdiri atas tiga tahap: (1) pra-lapangan: penentuan topik, observasi awal, dan penyusunan proposal; (2) lapangan: pengumpulan data di sekolah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; (3) pasca-lapangan: analisis data, validasi, dan penyusunan laporan penelitian.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Temuan

Kondisi pengelolaan sarana dan prasarana di UPT SD Negeri KingKing 2 Tuban

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan sarana dan prasarana di SDN Kingking 2 Tuban, diketahui bahwa fasilitas yang tersedia masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun ruang yang ada. Beberapa fasilitas utama seperti ruang kelas, kamar mandi, ruang guru, mushola, dan kantin sudah tersedia, namun keterbatasan lahan membuat ruang perpustakaan yang kini digabung dengan UKS menjadi kurang memadai. Beberapa sarana seperti LCD proyektor juga masih kurang lengkap. Meskipun demikian, sekolah tetap berusaha memaksimalkan pemanfaatan sarana yang ada, misalnya dengan penggunaan proyektor secara bergantian untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek seperti P5. Keterbatasan ini tidak mengurangi semangat guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teori Mustari (2022) yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi dasar penting untuk pembelajaran yang efektif. Kondisi keterbatasan tersebut menegaskan pentingnya manajemen yang inovatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bafadal bahwa prasarana dapat tetap menunjang proses belajar apabila dikelola dengan baik (Firmasyah, 2020).

Kondisi sarana dan prasarana di sekolah masih tergolong kurang memadai, menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dari segi luas lahan serta jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia. Pengelolaan dilakukan secara administratif menggunakan aplikasi E-BMD dan dilaporkan secara berkala, meskipun keterbatasan alat pembelajaran dan ruang menjadi tantangan utama. Kendati begitu, pihak sekolah tetap berusaha memaksimalkan penggunaan sarana yang ada agar dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Terry (2009) yang menyatakan bahwa pengelolaan mencakup pelaksanaan dan pengawasan guna mencapai efisiensi kerja. Pemanfaatan aplikasi E-BMD menunjukkan adanya pengawasan berbasis teknologi yang efektif dalam pengelolaan sarpras.

Pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, komite sekolah, dan wali murid. Proses dimulai dari pendataan kebutuhan melalui rapat, penyusunan rencana anggaran, hingga pembelian barang berdasarkan prioritas. Setelah pengadaan, barang dicatat oleh pihak yang bertanggung jawab dan penggunaannya dipantau melalui sistem izin pemakaian agar sarana digunakan sesuai kebutuhan dan keterbatasan kondisi sekolah. Di tingkat kelas, guru berusaha menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan menata perlengkapan secara efektif serta melakukan penyesuaian secara berkala. Meski terdapat keterbatasan alat seperti Chromebook, guru tetap mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia, termasuk penggunaan proyektor sebagai pendukung pembelajaran, khususnya dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dari segi administrasi, pengelolaan sarpras dilakukan dengan pelaporan rutin setiap triwulan dan tahunan melalui aplikasi E-BMD, serta didukung oleh dokumentasi tertib seperti buku kontrol, pencatatan aset, dan prosedur penghapusan barang rusak yang diajukan ke dinas. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen sarpras menurut Kemdiknas (2013) yang meliputi analisis kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemanfaatan, dan penghapusan. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan prinsip kolaborasi sesuai dengan fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan manajemen yang diuraikan oleh Terry (2009).

Pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah dilakukan secara rutin dan terjadwal setiap tiga bulan melalui laporan triwulan, yang kemudian disusun kembali dalam laporan tahunan. Seluruh fasilitas diperiksa secara menyeluruh, dan jika ditemukan kerusakan, segera diidentifikasi untuk diajukan perbaikannya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selain pemeliharaan berkala, sekolah juga cepat tanggap terhadap laporan kerusakan yang terjadi tiba-tiba dari guru. Semua data terkait pemeliharaan dicatat menggunakan aplikasi E-BMD guna memastikan pengelolaan yang tertib dan terorganisir. Walaupun jumlah sarana terbatas, sekolah terus berupaya mempertahankan kualitas fasilitas agar dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Hal ini sejalan dengan teori pemeliharaan Nurabadi (2014) yang membagi pemeliharaan menjadi berkala dan darurat. Penggunaan pencatatan digital mencerminkan pemanfaatan sistem informasi sebagai bagian dari kontrol mutu.

Keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah, sehingga beberapa fasilitas seperti perpustakaan harus digabungkan dengan ruang lain, misalnya UKS, sehingga belum memenuhi standar kelayakan. Kondisi ruang yang sempit membatasi penyediaan dan penataan fasilitas secara optimal. Meski begitu, sekolah terus berusaha memaksimalkan pemanfaatan ruang yang ada dengan menerapkan sistem peminjaman barang agar seluruh warga sekolah dapat menggunakan fasilitas secara bergantian. Selain itu, pengelolaan sarana didukung oleh pencatatan yang terorganisir menggunakan aplikasi E-BMD guna memastikan semua barang terdata dan terawasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Moenir (dalam Firmasyah, 2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan ruang sebagai bagian dari prasarana membutuhkan strategi pengelolaan yang efisien agar tetap mendukung kegiatan belajar.

Sekolah menerapkan prosedur yang terstruktur dalam menangani barang-barang yang mengalami kerusakan berat atau sudah tidak layak digunakan. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap kondisi barang tersebut. Setelah identifikasi selesai, barang-barang tersebut didata dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti berita acara, kemudian diajukan usulan penghapusannya ke Dinas Pendidikan. Proses ini bertujuan agar pengelolaan aset sekolah tetap teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan

dengan prinsip penghapusan dalam manajemen sarana dan prasarana menurut Kemdiknas (2013) yang meliputi tahap identifikasi, dokumentasi, dan pelaporan kepada dinas. Pendapat Saverus (2021) juga mendukung bahwa penghapusan diperlukan demi efisiensi dan akuntabilitas.

Proses penghapusan barang rusak di sekolah dilakukan secara teratur, dimulai dengan pendataan aset yang sudah tidak layak digunakan, lengkap dengan pembuatan berita acara serta dokumentasi berupa foto sebagai bukti pendukung. Setelah semua dokumen terkumpul, sekolah mengajukan permohonan penghapusan ke Dinas Pendidikan dan menunggu proses verifikasi serta persetujuan. Jika permohonan disetujui, barang tersebut resmi dihapus dari daftar inventaris sekolah. Prosedur penghapusan yang sistematis ini sesuai dengan tahapan manajemen fasilitas menurut Barnawi dan Arifin (2012), yang menekankan pentingnya prosedur dokumentasi dan akuntabilitas sebelum penghapusan disahkan.

Proses pengelolaan dan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah melibatkan beberapa pihak, antara lain kepala sekolah, staf pengelola sarpras, serta Dinas Pendidikan yang bertugas melakukan validasi dan memberikan persetujuan. Selain itu, bendahara atau guru lain juga dapat dilibatkan untuk membantu dalam dokumentasi dan kelengkapan administrasi, agar proses berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur. Hal ini menggambarkan prinsip partisipasi dalam manajemen, sesuai dengan teori Syamsu yang menyatakan bahwa fungsi manajerial meliputi pengorganisasian serta pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

Barang-barang yang diajukan untuk penghapusan biasanya adalah yang mengalami kerusakan parah dan tidak bisa diperbaiki atau dimanfaatkan kembali. Contohnya meliputi meja, kursi, lemari yang sudah lapuk, serta peralatan elektronik seperti kipas angin dan proyektor yang sudah mati total, sehingga tidak lagi layak digunakan dalam proses pembelajaran. Kerusakan berat pada barang tersebut sesuai dengan kriteria penghapusan menurut peraturan Kemdikbudristek (2023) dan teori Saverus (2021), yaitu ketika barang tidak dapat diperbaiki, berpotensi membahayakan, dan tidak efisien secara biaya.

Kriteria penghapusan barang di sekolah didasarkan pada kondisi fisik dan fungsi barang tersebut. Barang dikategorikan layak untuk dihapus jika mengalami kerusakan parah, tidak dapat diperbaiki, dan tidak lagi berfungsi sesuai tujuan. Selain itu, faktor lain yang diperhatikan meliputi ketidakefisienan biaya perbaikan, risiko bahaya jika tetap digunakan, serta umur dan masa pakai barang tersebut. Semua faktor tersebut menjadi dasar dalam memutuskan apakah suatu barang perlu diajukan untuk penghapusan. Hal ini sesuai dengan standar penghapusan dalam manajemen fasilitas menurut Barnawi & Arifin (2012), yang menekankan pentingnya penilaian objektif terhadap usia, kondisi fisik, dan biaya perbaikan. Berkala setiap tahun, biasanya bersamaan dengan kegiatan inventarisasi barang pada akhir atau awal tahun ajaran. Melalui proses ini, sekolah dapat mengetahui secara menyeluruh kondisi barang, sehingga dapat menentukan mana yang masih layak digunakan dan mana yang perlu diperbaiki atau dihapuskan. Sesuai dengan teori Imron (2004), inventarisasi bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi serta menjadi dasar dalam menyusun rencana pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana.

Evaluasi sarana dan prasarana di sekolah dilakukan dengan pemeriksaan langsung oleh tim internal yang secara teliti menilai kondisi setiap barang. Hasil evaluasi tersebut kemudian dibahas dan dicatat dalam berita acara sebagai dokumen resmi. Barang-barang yang mengalami kerusakan berat didokumentasikan secara rinci dan dilaporkan dalam berita acara tersebut untuk diajukan ke Dinas Pendidikan. Setelah itu, Dinas akan melakukan verifikasi sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses pengawasan menurut Syamsu dalam fungsi manajerial, sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban sekolah dalam pengelolaan aset pendidikan.

Hasil evaluasi terhadap sarana dan prasarana dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan pengadaan barang baru di sekolah, sehingga kebutuhan yang paling penting dapat diprioritaskan secara tepat. Selain itu, evaluasi tersebut juga mendorong upaya pemeliharaan barang yang masih

digunakan agar kondisinya tetap terjaga dan umur pakainya dapat diperpanjang. Hal ini sejalan dengan konsep perencanaan menurut Barnawi & Arifin (2012), yang menyatakan bahwa evaluasi kebutuhan merupakan dasar dalam menentukan prioritas pengadaan dan perbaikan sarana prasarana di sekolah.

Kontribusi pengelolaan sarana dan prasarana terhadap motivasi belajar siswa

Meskipun sarana dan prasarana di sekolah masih terbatas, fasilitas yang ada seperti proyektor dan laptop memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi serta antusiasme belajar siswa, khususnya dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pemanfaatan alat-alat tersebut menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, upaya sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan sarana secara bergiliran serta penyediaan pojok baca juga memberikan dampak positif terhadap semangat belajar siswa, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan mendukung proses pembelajaran yang bervariasi dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Uno (2011) yang menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal peserta didik untuk melakukan perubahan perilaku dalam proses pembelajaran. Sarana seperti proyektor dan laptop berfungsi sebagai stimulus visual dan auditori yang dapat merangsang keaktifan belajar siswa. Selain itu, menurut Mulyasa (2013), pengelolaan sarana pendidikan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mampu meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Pojok baca juga memperkuat budaya literasi, yang menjadi bagian penting dalam Kurikulum Merdeka dan sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.

Penambahan sarana dan prasarana seperti proyektor, laptop, dan media visual telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan belajar siswa. Dengan kehadiran media visual, siswa menjadi lebih mudah memahami materi karena mereka dapat melihat secara langsung proses pembelajaran, seperti pada kegiatan P5 membuat telur asin yang disajikan melalui video, sehingga siswa menjadi lebih fokus dan antusias. Selain itu, perbaikan dan penambahan sarana-prasarana tersebut juga meningkatkan semangat belajar siswa serta mempercepat pemahaman materi, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan teori Sardiman (2011) yang menyatakan bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong tindakan dan sekaligus pengarah tujuan. Media visual seperti video pembelajaran memberikan rangsangan multisensori yang menurut Slameto (2010) mampu mempercepat daya tangkap dan pemahaman siswa terhadap materi. Dalam konteks ini, peningkatan sarana dan prasarana juga berarti peningkatan kualitas input pembelajaran, yang menurut Bafadal (2003) akan berdampak pada peningkatan hasil belajar serta motivasi siswa.

Sarana di dalam kelas digunakan langsung dalam proses pembelajaran dan diatur oleh guru sesuai dengan kebutuhan, dengan penataan ulang dilakukan setiap semester untuk menjamin kenyamanan serta kemudahan akses bagi siswa. Walaupun jumlah alat seperti Chromebook terbatas sehingga penggunaannya harus bergiliran, sarana tersebut tetap mendukung aktivitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran TIK. Selain itu, guru juga memanfaatkan beragam media pembelajaran seperti kartu dan lembar kerja yang membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Kehadiran pojok baca di kelas memberikan motivasi tambahan bagi siswa untuk meningkatkan semangat membaca, sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Menurut Hamzah B. Uno (2011), lingkungan belajar yang tertata rapi, termasuk pengelolaan sarana, dapat menciptakan kondisi belajar yang kondusif serta meningkatkan motivasi belajar afektif siswa, seperti kenyamanan dan rasa ingin tahu. Pendapat Terry (2009) juga mendukung bahwa manajemen yang baik melibatkan perencanaan dan pengorganisasian ruang serta sumber daya secara efektif. Selain itu, Suprihatiningrum (2013) menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran yang beragam, seperti kartu dan lembar kerja, dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dan membuat proses belajar menjadi lebih bermakna. Pojok baca juga berperan dalam memperkuat motivasi literasi dan menjadi bagian dari budaya pembelajaran

yang mendukung keterlibatan aktif siswa (student agency) dalam Kurikulum Merdeka.dari budaya pembelajaran yang mendukung student agency dalam Kurikulum Merdeka

Tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana

Tantangan utama yang dialami sekolah adalah keterbatasan dana, yang terutama disebabkan oleh jumlah siswa yang sedikit sehingga dana BOS yang diterima pun terbatas. Kondisi ini memengaruhi pengadaan sarana dan prasarana yang harus terus disesuaikan dengan kebutuhan Kurikulum Merdeka dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sehingga sekolah perlu menentukan prioritas dan sering kali menunda pembelian barang sesuai dengan kondisi anggaran yang ada. Selain masalah dana, sekolah juga menghadapi kendala lahan yang sempit sehingga penataan barang baru menjadi sulit dilakukan. Penggunaan alat yang terbatas dan adanya kerusakan pada peralatan dikelola dengan sistem pemakaian secara bergantian dan perbaikan yang menunggu persetujuan serta ketersediaan dana. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah melibatkan komite dan orang tua dalam musyawarah serta aktif mencari dukungan dari pihak eksternal yang peduli terhadap pendidikan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya berasal dari ketersediaan barang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keuangan, ruang, dan partisipasi masyarakat. Menurut Terry (2009), perencanaan dalam manajemen pendidikan harus memperhatikan keterbatasan sumber daya agar keputusan yang diambil efektif. Keterbatasan dana yang muncul akibat sedikitnya peserta didik berdampak pada rendahnya pendanaan BOS, menegaskan pentingnya manajemen yang berbasis kebutuhan dan prioritas, sebagaimana dikemukakan Barnawi dan Arifin (2012) bahwa pengelolaan sarpras harus mempertimbangkan urgensi dan efektivitas pemakaian. Masalah lahan yang sempit sejalan dengan pandangan Moenir (dalam Firmasyah, 2020) yang menyatakan bahwa ruang termasuk komponen prasarana, dan keterbatasannya dapat menghambat efisiensi operasional sekolah. Upaya sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melibatkan musyawarah bersama komite dan orang tua mencerminkan pendekatan partisipatif, yang menurut teori Syamsu merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan manajerial di bidang pendidikan.

Dalam mengatasi keterbatasan dana dan sarana, sekolah menerapkan langkah dengan menetapkan prioritas kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Komite sekolah dan wali murid diajak berpartisipasi dalam diskusi agar mereka memahami kondisi yang ada dan dapat memberikan dukungan, baik dalam bentuk saran maupun bantuan. Selain itu, sekolah juga aktif mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan serta mencari dukungan dari lembaga eksternal yang peduli pada bidang pendidikan. Di sisi lain, sekolah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dengan sistem pemakaian secara bergiliran dan pencatatan yang tertib menggunakan aplikasi E-BMD. Kerjasama antar guru juga dilakukan untuk menemukan alternatif alat atau metode pembelajaran yang tepat, sehingga walaupun ada keterbatasan, operasional sekolah tetap berjalan dengan fleksibel, terencana, dan terkendali. Langkah yang diambil oleh sekolah ini mencerminkan penerapan manajemen strategis dalam menghadapi kendala. Strategi prioritas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ini sejalan dengan pendapat Bafadal (dalam Firmasyah, 2020) yang menekankan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kegunaan maksimal.

Keterlibatan komite sekolah dan orang tua siswa mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Gits Media (2006), yang menegaskan bahwa kontribusi tidak hanya berupa dukungan materi, tetapi juga ide serta dukungan moral. Hal ini menggambarkan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang sangat ditekankan dalam Kurikulum Merdeka. Upaya aktif sekolah dalam mengajukan proposal dan menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal merupakan bentuk pelaksanaan fungsi manajerial eksternal, yaitu membangun hubungan dan kolaborasi demi kelangsungan operasional pendidikan (Terry, 2009).

Selain itu, pencatatan aset yang dilakukan melalui aplikasi E-BMD menunjukkan pengelolaan administrasi secara digital sesuai standar yang dianjurkan oleh Kemdikbudristek, sementara kerja sama antar guru memperkuat kolaborasi profesional dalam pelaksanaan prinsip Merdeka Belajar.

Strategi pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung P5

Sekolah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, seperti ruang tata usaha yang berperan sebagai pusat akses administrasi, referensi, dan modul pembelajaran P5. Keberadaan ruang ini mempermudah guru dalam menyusun serta mengelola materi pembelajaran yang sesuai dengan P5. Selain itu, penggunaan perangkat seperti proyektor dan laptop juga dioptimalkan untuk membantu siswa memahami materi sebelum praktik P5 dilakukan. Walaupun jumlah alat terbatas, guru mengatur pemakaiannya secara bergiliran serta memastikan pencatatan dan perawatan berjalan dengan baik. Jika ada kekurangan sarana, kebutuhan tersebut dilaporkan untuk diajukan dalam perencanaan anggaran (RKAS) berikutnya. Strategi pengelolaan ruang dan perangkat pendukung kegiatan P5 yang diterapkan sekolah mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana, sebagaimana dijelaskan oleh Bafadal (dalam Firmasyah, 2020). Pemanfaatan ruang tata usaha sebagai pusat administrasi dan pengelolaan P5 menunjukkan penerapan prinsip fleksibilitas dalam prasarana pendidikan, yang mendukung pelaksanaan kurikulum tematik integratif seperti P5. Peran guru dalam mengatur pemakaian alat secara bergantian juga menunjukkan pelaksanaan fungsi pengorganisasian dan pengawasan, sesuai dengan penjelasan Terry (2009). Sedangkan pengajuan kebutuhan ke dalam RKAS merupakan bagian dari fungsi perencanaan manajerial dalam manajemen sarpras, yang menurut Barnawi & Arifin (2012) harus berlandaskan pada kebutuhan nyata yang diprioritaskan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P5 di sekolah masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan alat dan media pembelajaran, seperti proyektor dan laptop yang belum cukup untuk semua kelas. Oleh karena itu, pemakaian fasilitas tersebut harus dilakukan secara bergiliran dan terjadwal. Meski dengan keterbatasan fasilitas, para guru tetap antusias dan berinovasi dengan mencari alternatif alat atau menyederhanakan kegiatan praktik agar siswa tetap bisa mengikuti proyek P5. Pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tercantum dalam RKAS. Situasi ini menegaskan pentingnya manajemen yang berfokus pada kebutuhan. Menurut teori Mustari (2022), pengelolaan sarpras yang efektif melibatkan penyesuaian antara kebutuhan pembelajaran dan kemampuan pengadaan, yang tercermin dalam pengaturan jadwal pemakaian serta prioritas pengadaan. Kreativitas guru dalam mengatasi keterbatasan sarana juga merupakan bentuk implementasi pendidikan karakter melalui keteladanan dan inovasi, sesuai dengan prinsip utama Proyek P5. Hal ini juga terkait dengan fungsi adaptasi dan inovasi dalam manajemen pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Mulyasa (2013), bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana, tetapi juga oleh kreativitas dalam pelaksanaannya.

Guru memiliki peran yang sangat krusial dalam memanfaatkan sarana dan prasarana guna menunjang keberhasilan pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Selain menyiapkan materi dan media seperti tayangan video melalui proyektor atau laptop, guru juga membimbing siswa dalam setiap langkah pelaksanaan proyek agar berjalan secara efektif dan menyenangkan. Walaupun keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala, baik guru maupun siswa tetap menunjukkan kreativitas dan semangat kolaboratif. Proyek seperti pembuatan telur asin menjadi lebih menarik dan mudah dipahami berkat dukungan visual, kerja sama antar siswa, serta pendekatan praktik langsung yang mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar. Hal ini menegaskan posisi sentral guru sebagai fasilitator sekaligus penggerak utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini, Uno (2011) menekankan bahwa motivasi belajar siswa sangat

dipengaruhi oleh rangsangan yang diberikan guru melalui media dan variasi pendekatan pembelajaran. Penggunaan media visual dan metode praktik langsung merupakan wujud dari pembelajaran kontekstual yang efektif dalam mendukung dimensi P5, seperti gotong royong, kreativitas, dan kemandirian. Pandangan ini sejalan dengan teori George R. Terry (1972) yang menyebutkan bahwa perencanaan pendidikan melibatkan penetapan tujuan, pengelolaan sumber daya, serta strategi pencapaian, di mana guru menjalankan peran sebagai pelaksana strategi di tingkat operasional.

Diskusi

Kondisi pengelolaan sarana dan prasarana di UPT SD Negeri KingKing 2 Tuban

Pengelolaan sarana dan prasarana di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban menunjukkan bahwa meskipun dalam keterbatasan, sekolah tetap mampu menerapkan sistem manajemen fasilitas yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Aisah, Achmad, Khoeriah, & ..., 2021) yang menyatakan bahwa manajemen fasilitas sekolah adalah upaya terkoordinasi dalam memastikan penggunaan infrastruktur pendidikan secara optimal untuk mendukung tujuan pembelajaran. Selain itu, strategi penggabungan fungsi ruang seperti perpustakaan dengan UKS merupakan bentuk adaptasi manajerial terhadap keterbatasan lahan, sebagaimana ditekankan (Devi, 2021) bahwa efektivitas pengelolaan fasilitas tidak hanya bergantung pada kelengkapan, tetapi juga pada inovasi dan efisiensi.

Kontribusi pengelolaan sarana dan prasarana terhadap motivasi belajar siswa

Temuan penelitian ini mendukung teori motivasi belajar (ananda dwiky putra, 2019) yang menyebutkan bahwa media pembelajaran yang menarik dan lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan media visual melalui proyektor mampu menarik minat siswa. Selain itu, pojok baca di kelas serta kegiatan berbasis praktik dalam P5 mendorong siswa untuk belajar secara aktif. Penelitian ini juga sejalan dengan Hidayat Rizandi et al. (2023) yang menemukan adanya korelasi positif antara kualitas fasilitas pendidikan dengan semangat belajar siswa. Lingkungan belajar yang mendukung baik secara fisik maupun psikologis menjadi faktor penting dalam menumbuhkan minat belajar.

Tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana

Tantangan utama dalam pengelolaan sarana prasarana di sekolah ini mencerminkan masalah umum di berbagai sekolah di Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Kemenko PMK (2022), masih banyak sekolah yang belum memperoleh alokasi anggaran perbaikan fasilitas, sehingga pengelolaan harus dilakukan secara efisien dan inovatif. Kurangnya dana BOS akibat sedikitnya jumlah peserta didik membuat sekolah harus menetapkan skala prioritas dalam pengadaan barang. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mohamad Mustari, 2022) bahwa pemenuhan standar minimal fasilitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran dan kapasitas manajerial sekolah.

Strategi pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung P5

Strategi pengelolaan sarpras untuk mendukung P5 di UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban mencerminkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang menekankan fleksibilitas, partisipasi, dan kontekstualitas. Strategi pemanfaatan lingkungan lokal sebagai sumber belajar sesuai dengan pendapat (Adab et al., 2023), bahwa pengelolaan fasilitas tidak harus terfokus pada infrastruktur internal sekolah, melainkan juga dapat melibatkan sumber daya komunitas dan lingkungan sekitar. Pendekatan berbasis proyek yang diterapkan dengan memanfaatkan fasilitas sederhana namun relevan berhasil meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Strategi kolaboratif antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan Dinas Pendidikan juga mencerminkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang efektif.

Ucapan Terima Kasih: Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan

lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Kaniati Amalia, M.Pd., selaku dosen pembimbing utama, atas segala arahan, saran, dan dukungan yang telah diberikan hingga penelitian ini terselesaikan.

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan maupun penulisan hasil penelitian ini. Seluruh kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri tanpa adanya dukungan dana dari pihak manapun.

4. KESIMPULAN

UPT SD Negeri Kingking 2 Tuban menghadapi keterbatasan dalam hal lahan, jumlah fasilitas, dan media pembelajaran. Namun, sekolah mampu mengelola sarana secara terorganisir melalui perencanaan, pencatatan aset via E-BMD, serta pelaporan rutin. Keterbatasan proyektor dan alat bantu diatasi dengan penggunaan bergilir dan penataan ruang yang mendukung pembelajaran. Keterlibatan seluruh elemen sekolah dan adaptasi terhadap pembelajaran berbasis proyek menjadi kunci pengelolaan yang tetap berjalan efektif. Penggunaan sarana seperti proyektor, laptop, media visual, dan pojok baca berhasil menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menarik. Pemanfaatan fasilitas dalam kegiatan P5 mendorong minat dan partisipasi aktif siswa. Meskipun terbatas, pengelolaan sarpras yang optimal membentuk lingkungan belajar yang mendukung peningkatan motivasi siswa.

Keterbatasan anggaran akibat jumlah siswa yang sedikit menjadi tantangan utama, berdampak pada lambatnya pengadaan fasilitas. Hambatan lain berupa keterbatasan lahan, kerusakan alat, dan jumlah perangkat yang terbatas. Sekolah mengatasi hal ini dengan penjadwalan, musyawarah dengan komite, serta upaya dukungan eksternal, sembari tetap menjalankan pencatatan dan kolaborasi guru secara aktif. Strategi pengelolaan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan P5 melalui optimalisasi fasilitas yang ada. Fasilitas digunakan secara bergiliran dan terjadwal dengan pencatatan yang rapi. Guru berperan aktif dalam menyiapkan media dan membimbing siswa dalam proyek, seperti pembuatan telur asin berbasis lingkungan. Strategi ini menunjukkan kreativitas dan kolaborasi dalam mengatasi keterbatasan, sehingga kegiatan P5 tetap berjalan secara efektif dan kontekstual.

REFERENSI

- Adab, F., Humaniora, D. A. N., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2023). *PEMANFAATAN MUSEUM ACEH SEBAGAI LEMBAGA*.
- Aisah, I., Achmad, A., Khoeriah, N. D., & ... (2021). Management of Infrastructure in Improving the Quality of Vocational High School Graduates. *Journal of Industrial ...*, 2(4), 172–189. Retrieved from <https://www.jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/176%0Ahttps://www.jiemar.org/index.php/jiemar/article/download/176/135>
- ananda dwiky putra, H. A. (2019). *Pentingnya Sarana dan Prasarana Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMAN 16 Tebo*. 2.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan 2023. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 12). Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>
- Belajar, M., Di, S., Raudlatul, M. A., & Suko, I. (2024). *Keterbatasan Manajemen Sarana Dan Prasarana Dapat Menunjang*.
- Dapodik. (2023). *Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi*. Retrieved from <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/A07B45F3079052C50D5D#>
- Devi, A. D. (2021). Standarisasi dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i2.242>
- Hidayat Rizandi, Muhammad Arrazi, Asmendri, & Milya Sari. (2023). *Pentingnya Manajemen Sarana*

- dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.51339/akademika.v5i1.745>
- Kemendikbud. (2024). Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. *Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024*, 1–26.
- KEMENDIKBUDRISTEK. (2023). *Permendikbud No. 22 Tahun 2023 Standart Sarana dan Prasarana Pendidikan*. (226). Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- KOORDINATOR, K., & KEBUDAYAAN, B. P. M. D. (n.d.). *Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. (2019). Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-tingkatkan-kualitas-pendidikan-di-indonesia>
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mohamad Mustari, P. D. (2022). *MANAJEMEN PENDIDIKAN DI ERA MERDEKA BELAJAR* (M. T. Rahman, ed.). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BdxfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Kualitas+fasilitas+fisik+sekolah+merupakan+penentu+utama+hasil+akademiknya.+Keberhasilan+dan+kelancaran+pembelajaran+di+kelas+sangat+dipengaruhi+oleh+kelengkapan+dan+ketersediaan>
- Motivasi, M., Siswa, B., Man, D. I., & Kediri, K. (2021). *Oleh : Intan Sari Dewi FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI*.
- Nurhuda, A., Al Fajri, M., Shahrulerizal, T. E., & Rahman, E. A. (2023). The Concept of Facilities and Infrastructure Management in Schools: A Literature Review. *International Journal of Education & Curriculum Application*, 6(3), 248–260. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/IJECA>
- Permendiknas-No.-24-tahun-2007 STANDAR Sarana.* , Pub. L. No. 24 (2011).